

RINGKASAN

**SHINDI FRATIWI
210510125**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN ATAS
PASAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM
OLEH HAKIM (Studi Kasus Putusan
No.112/Pid.B/2024/PN.Srh)**

**(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan
Fitria Mardhatillah, S.H.I,M.H.)**

Pembuktian dalam konteks hukum acara pidana merujuk pada ketentuan yang mengatur batasan-batasan dalam sidang pengadilan terkait upaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum. Setiap pihak terlibat dalam proses ini harus mengikuti ketentuan serta prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Tidak diperkenankan ada pihak yang bertindak di luar ketentuan tersebut dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa yang tidak boleh mempertahankan klaim di luar aturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Ahmad rozikin Alias Oca sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggungjawab pelaku terhadap korban dalam tindak pidana penggelapan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis secara prespektif-normatif.

Hasil dari penelitian ini, hakim memutuskan pasal yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum setelah melakukan analisis pembuktian secara independen dan objektif. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat dengan berpura-pura memohon untuk memperoleh barang, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, bukan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP yang dituntut jaksa. Keputusan hakim ini didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap unsur objektif dan subjektif tindak pidana, serta prinsip kebenaran materiil dalam penegakan hukum. Walaupun demikian, perubahan pasal tersebut harus disertai pemberitahuan yang memadai kepada terdakwa untuk menjamin hak atas pembelaan yang adil.

***Kata Kunci* : Pembuktian, Penerapan, Pertanggungjawaban, Pertimbangan Hakim.**

SUMMARY

**SHINDI FRATIWI
210510125**

**LEGAL ANALYSIS OF EVIDENCE OF
ARTICLES THAT DO NOT MATCH THE
PUBLIC PROSECUTOR'S DEMAND BY THE
JUDGE (Case Study of Decision No.
112/Pid.B/2024/PN.Srh)**

**(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. and
Fitria Mardhatillah, S.H.I, M.H.)**

Evidence in the context of criminal procedural law refers to provisions governing the limits of court proceedings related to efforts to seek and defend the truth, whether by the judge, public prosecutor, defendant, or legal counsel. Every party involved in this process must adhere to the provisions and procedures stipulated by law. No party is permitted to act outside these provisions in assessing evidence, including the defendant, who may not assert claims outside the applicable rules.

This study aims to determine the responsibilities of Ahmad Rozikin, alias Oca, as the perpetrator of the crime of embezzlement, to examine the legal protection and responsibilities of the perpetrator towards the victim in the crime of embezzlement, and to examine the judge's considerations in the court's decision, Decision Number 112/Pid.B/2024/PN.Srh.

This study employs a normative legal research method, employing both a statutory and case-based approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, along with a normative-perspective analysis.

The results of this study, the judge decided on a different article from the Public Prosecutor's demands after conducting an independent and objective analysis of the evidence. The trial facts show that the defendant used deception by pretending to ask for goods, so it is more appropriately categorized as fraud under Article 378 of the Criminal Code, rather than embezzlement under Article 372 of the Criminal Code as charged by the prosecutor. The judge's decision was based on a comprehensive assessment of the objective and subjective elements of the crime, as well as the principle of material truth in law enforcement. However, the change in the article must be accompanied by adequate notification to the defendant to guarantee the right to a fair defense.

Keywords : Proof, Implementation, Accountability, Judge's Consideration.